

# MODEL PEMBELAJARAN BERKEHIDUPAN BERSAMA LINTAS ETNIK DAN AGAMA

## INTERETHNIC AND INTERRELIGIOUS MODEL FOR LEARNING TO LIVE TOGETHER

*M. Thoyibi\**, *Yayah Khisbiah\*\**  
*Abdullah Aly\*\*\**, *Zakiyuddin Baidhowy\*\*\**

\* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

\*\* Fakultas Psikologi

\*\*\* Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jalan A. Yani Tromol Pos I Surakarta 57102

Telp. 0271-717417 psw 327

### ABSTRACT

The major problem of this first year research is how the conceptual model of learning to live together inter-ethnic and religion appropriate with the problems faced by students in their everyday social interaction looks like. The approach used in this research is survey for needs assessment in order to find out the school condition and the social interaction of the students at schools every day. The data-collecting methods employed include interview and questionnaire. The interview is conducted with the student informants. The questionnaire is for the schoolmasters and the GC (guidance and counseling) teachers of five different schools. The conclusions of the research are as follows. Firstly, the schools have not taken into consideration the variety of students' ethnic and religious backgrounds and they have not made particular policy and provided the students with particular learning experience to manage the diversity of the students. While in their social interaction, the students encounter with problems indicating that they are lack of the social skills for social interaction. Secondly, the module of learning to live together inter-ethnic and inter-religion, being the product of the first year research, has been designed based on the needs assessment in schools. The review of the module states that the learning material, objective, and strategy prepared in the module are appropriate with the students' needs, meaning that conceptually the module can serve as an alternative model of learning to live together.

Kata Kunci: *model pembelajaran, berkehidupan bersama, lintas etnik, dan agama*

## PENDAHULUAN

Berbagai kerusuhan dan ketegangan sosial yang terjadi di tanah air dalam dasa warsa sejak akhir 1980-an sampai pada tingkat tertentu menunjukkan bahwa realitas bangsa Indonesia yang multi-etnik dan multi-agama ini belum dapat dikelola dengan baik. Kerusuhan-kerusuhan tersebut mengisyaratkan bahwa pendekatan dan strategi yang telah diterapkan, terutama selama pemerintahan Orde Baru, tak lagi tepat untuk digunakan dalam konteks masa kini. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa Indonesia, baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya perlu berusaha menemukan cara-cara yang lebih tepat dalam mengelola keaneka-ragaman masyarakat ini.

Di samping faktor politik, ekonomi, dan paham keagamaan, perbedaan latar belakang etnik merupakan faktor yang sering mewarnai berbagai kerusuhan selama ini, sebagaimana tercermin pada kerusuhan di Pontianak (etnik Dayak melawan etnik Madura), Jakarta (etnik Jawa/Sunda melawan etnik Cina), dan Surakarta (etnik Jawa melawan etnik Cina dan Arab). Dalam beberapa kasus kerusuhan, faktor-faktor tersebut teranyam satu sama lain sedemikian rupa, sehingga faktor yang satu sulit dipisahkan dari faktor lainnya. Meskipun faktor perbedaan etnik sering dinafikan dalam berbagai pernyataan resmi, kenyataan menunjukkan bahwa terdapat suatu kelompok etnik tertentu yang menjadi sasaran dan sekaligus korban dominan di dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut. Dalam kasus kerusuhan Mei 1988 di Jakarta dan Surakarta, misalnya, pemicunya adalah faktor politik tetapi kemudian berkembang menjadi sentimen etnik. Sementara itu, kerusuhan di Surakarta pada tahun 1980, pemicunya adalah kecelakaan lalu-lintas antara dua pemuda, tetapi kemudian berkembang menjadi kerusuhan anti-Cina. Kenyataan ini menyiratkan bahwa perbedaan latar belakang etnik potensial untuk memicu kerusuhan, mengubah inti persoalan kerusuhan, atau meningkatkan eskalasi kerusuhan.

Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki keanekaragaman etnik dan agama serta memiliki sejarah kerusuhan yang berulang-ulang, sejak sebelum kemerdekaan hingga akhir abad ke-20 dengan faktor pemicu yang berbeda-beda. Hasil penelitian Mulyadi dkk. (1999) tentang radikalisasi sosial masyarakat Surakarta menunjukkan adanya pola keberulangan peristiwa kerusuhan dan menyebutkan angka frekuensi kejadian sedemikian tinggi dalam sejarah kota Surakarta

Kenyataan di atas menunjukkan betapa relasi antaretnik di Surakarta merupakan konflik laten yang potensial meletus sewaktu-waktu dalam bentuk kerusuhan. Konflik laten ini potensial untuk berubah menjadi konflik manifes karena adanya bentuk-bentuk bias dalam relasi antaretnik, baik dalam bentuk stereotip (pendapat atau pandangan yang menggeneralisasikan ciri-ciri seseorang atau sekelompok orang berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tertentu), prasangka (perasaan atau sikap negatif pada orang/kelompok yang dicitrakan dalam

stereotip tertentu), dan diskriminasi (perilaku nyata yang membedakan orang/kelompok secara tidak adil) yang terlestarikan, baik secara sadar atau tak sadar, dalam kehidupan nyata sehari-hari sebagian besar masyarakat Surakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya rekayasa sosial yang mampu mengeliminasi proses pelestarian stereotip, prasangka, dan diskriminasi tersebut.

Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengeliminasi kesalahpahaman antaretnik di Surakarta, terutama antara masyarakat keturunan Jawa dan masyarakat keturunan Cina, melalui berbagai forum semacam yang telah dilakukan oleh PWS (Paguyuban Wong Solo) dan PMS (Perkumpulan Masyarakat Surakarta). Akan tetapi, inisiatif-inisiatif tersebut bisa dikatakan kurang memiliki agenda-agenda yang berkelanjutan, hanya melibatkan orang-orang dewasa yang sibuk dan telah memiliki status sosial-ekonomi mapan, serta sebagian besar di antaranya adalah kaum pria. Mengingat pentingnya relasi sosial yang harmonis lintas etnik dan agama ini, upaya-upaya integrasi perlu dilakukan oleh berbagai pihak, secara berkelanjutan, dan dilakukan secara lebih awal dengan melibatkan generasi muda (remaja).

Meskipun dalam konteks wacana publik dan di kalangan elit organisasi kemasyarakatan, persoalan keanekaragaman ini tidak dirasakan sebagai masalah, kenyataan di tingkat akar-rumput menunjukkan bahwa bentuk-bentuk stereotip, prasangka, dan diskriminasi merupakan sesuatu yang nyata dan tak bisa dipungkiri. Ketika Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan remaja lintas etnik dan agama, misalnya, stereotipe dan prasangka tersebut terungkap secara eksplisit, baik dalam pernyataan lisan maupun sikap peserta di awal kegiatan. Kenyataan itu menyiratkan bahwa tatanan dan relasi sosial masyarakat Surakarta saat ini sebenarnya mempunyai kontribusi pada pelestarian bentuk-bentuk stereotip dan prasangka antaretnik, sehingga perlu upaya-upaya terpadu yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan bentuk-bentuk bias relasi sosial tersebut.

Dalam pidato pembukaannya pada Kongres Kebudayaan di Bandung 1952 yang dimuat dalam *Madjalah Kebudayaan* III (Januari-Maret 1952), Mohammad Hatta menyatakan bahwa melebur keanekaragaman kebudayaan menjadi satu merupakan sesuatu yang sulit karena masing-masing terlahir dari semangat yang berbeda-beda, sehingga yang penting bagi bangsa Indonesia adalah membangun hubungan yang selaras antarkebudayaan yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika (Feith dan Castles, 1970: 287).

Sebagaimana halnya keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan yang ada di Indonesia, keberadaan kelompok etnik Cina di Indonesia juga menjadi kontroversi dalam integrasi bangsa Indonesia. Kehadiran pemukim Cina di Indonesia pertama kali diperkirakan terjadi pada abad V (Sa'dun, ed., 1999: 56; Taher, 1997a: 31). Para pemukim Cina pertama tersebut melakukan perdagangan dengan membawa

keramik, sutera, dan benang sutera; ketika pulang mereka membawa kayu cendana, sarang burung, emas, dan lain sebagainya (Sa'dun, ed., 1999: 56).

Migrasi orang-orang Cina dalam jumlah besar diperkirakan terjadi pada abad XVII, bersamaan dengan masuknya bangsa Barat ke Nusantara, dan pada awal abad XX, setelah Perang Dunia I, ketika orang-orang Cina tidak hanya datang ke Indonesia tetapi juga ke negara-negara Asia Tenggara lainnya (Sa'dun, ed., 1999: 56-61; Taher, 1997: 31-69; Skinner, 1957: 28-29). Di antara faktor penting penyebab kedua gelombang migrasi tersebut adalah situasi dalam negeri Cina. Pada abad XVII, orang-orang Cina banyak keluar dari negaranya karena negeri Cina sedang dilanda peperangan, kekacauan, dan kelaparan yang disebabkan oleh pergolakan politik dalam negeri, ketika Dinasti Ming runtuh dan digantikan oleh Dinasti Qing Manchu (Sa'dun, ed., 1999: 57; Sukisman, 1992: 2-20). Begitu pula, migrasi orang-orang Cina pada awal abad XX juga banyak disebabkan oleh kekacauan dalam negeri Cina, ketika kaum nasionalis Cina di bawah kepemimpinan Sun Yat Sen melakukan revolusi untuk meruntuhkan Dinasti Qing Manchu (Sa'dun, ed., 1999: 61; Sukisman, 1992: 118-131; Clubb, 1964: 36-43).

Sejak awal kemerdekaan, masyarakat Indonesia menyadari bahwa masalah hubungan antaretnik dapat menjadi potensi konflik sosial jika tidak diatasi dengan baik. Cara-cara yang diusulkan untuk mengatasi persoalan hubungan antaretnik tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua arus paham utama, yaitu: "integrasi" dan "asimilasi". Paham "integrasi", yang dipelopori oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), berpandangan bahwa persoalan hubungan antaretnik dapat diatasi dengan memberikan pengakuan sepenuhnya pada kelompok etnik Cina sebagai salah satu suku bangsa, sebagaimana Jawa, Sunda, Dayak, dan suku-suku lain-lain di Indonesia (Coppel, 1994: 91; Taher, 1997a: 124); sedangkan paham "asimilasi", yang dipelopori oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) dan Bakom-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) berpandangan bahwa persoalan hubungan antaretnis dapat diatasi bila kelompok keturunan Cina membaur dan mencairkan diri dengan masyarakat lokal (Coppel, 1994: 93; Taher, 1997a: 125). Namun demikian, karena Baperki mengidentifikasikan dirinya sebagai "alat revolusi" dan membela pelaksanaan Nasakom (Coppel, 1994: 91), ketika terjadi G30S/PKI pada tahun 1965, terjadi gerakan anti-Cina yang meluas (Coppel, 1994: 143-144) dan para tokoh Baperki yang dianggap sebagai penggiat komunisme banyak ditangkap atau lari ke luar negeri, sehingga paham integrasi kurang dapat berkembang (Taher, 1997a: 125). Meningkatnya gerakan anti-Cina dan tuntutan pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok memberikan peluang bagi paham asimilasi untuk menjadi semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Orde Baru.

Dukungan terhadap integrasi melalui asimilasi ini kemudian menjadi agenda

MPRS yang kemudian tertuang dalam Resolusi No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa. Inti Resolusi tersebut adalah melarang kepemilikan kewarganegaraan ganda dan mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing. Resolusi tersebut kemudian dijabarkan oleh pemerintah ke dalam berbagai produk hukum. Produk-produk hukum tersebut antara lain adalah: (1) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Pergantian Nama; (2) Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat-istiadat Cina; (3) Keputusan Presiden (Keppres) No. 240/1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut WNI Keturunan Asing; dan (4) Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

Namun demikian, produk-produk hukum tersebut belum mampu menuntaskan persoalan pembauran. Pendekatan asimilasi yang didukung oleh produk-produk hukum tersebut oleh kalangan masyarakat etnik Cina dirasakan sebagai pemasungan kebebasan dan penghilangan karakteristik budaya mereka, termasuk pengingkaran terhadap agama (Kong Hu Chu) mereka. Bahkan model asimilasi menyeluruh (asimilasi etnik Cina dengan masuk agama Islam sebagai agama mayoritas) yang dipelopori oleh Jahja (ed., 1991) juga belum menyelesaikan persoalan integrasi etnik.

Hasil penelitian Hariyono (1994) yang membandingkan kultur Cina dan kultur Jawa menemukan bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam proses asimilasi adalah tata-nilai tradisional Cina yang disebut sebagai “sistem familiisme”. Menurut P. Hariyono, “sistem familiisme” mempunyai kontribusi pada tingginya etnosentrisme di kalangan masyarakat etnik Cina dan menyebabkan rendahnya interaksi sosial dengan masyarakat setempat, sehingga memperkecil peluang terjadinya perkawinan campur (amalgamasi).

Menurut Taher (Taher, 1997a: 149 – 154), terdapat enam faktor penyebab belum tuntasnya pembauran, yaitu: (1) pengelompokan kewarganegaraan warisan pemerintah Hindia Belanda (Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra); (2) hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada kelompok etnik Cina; (3) hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru pada kelompok etnik Cina; (4) kecenderungan sikap chauvinistik kelompok etnik Cina; (5) dianutnya konsep kebangsaan atas dasar ras; (6) citra buruk muslim Indonesia yang dianggap identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kekerasan.

Namun demikian menurut Thung Ju Lan (dalam Wibowo, 1999: 22), kegagalan integrasi di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh bias asumsi yang mendasari kebijakan integrasi, bias “asimilasi”, yaitu bahwa asimilasi merupakan satu-satunya solusi permasalahan Cina di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan integrasi bangsa ini, menurut Thung Ju Lan (dalam Wibowo, 1999: 22), sudah saatnya perlu dikaji “dari luar” kerangka asimilasi.

Pendekatan integrasi “dari luar” kerangka asimilasi ini mulai mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah pasca Orde Baru. Pada masa kepresidenannya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6/2000 yang mencabut Inpres No. 14/1967, yang berarti bahwa masyarakat Tionghoa memperoleh kembali sebagian dari hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia, yang selama lebih dari tiga dasa warsa dibatasi oleh inpres tersebut, sehingga terjadi peningkatan apresiasi terhadap hal-hal yang dianggap sebagai representasi dari kelompok masyarakat etnik Cina, semacam pengakuan terhadap Imlek sebagai hari besar nasional, pengakuan terhadap pernikahan secara Kong Hu Chu, penggunaan bahasa Mandarin dalam media massa, dan penyelenggaraan kesenian barongsai dan wayang putehi.

Pencabutan Inpres No. 14/1967 dan perayaan Imlek serta pertunjukan seni sebenarnya tidak banyak memberikan kontribusi pada pengelolaan keanekaragaman masyarakat bila tidak diikuti dengan produk-produk hukum lain yang selaras, semacam RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang saat ini sedang digodog di DPR, atau produk yang diderivasi dari Keppres No. 6/2000 tersebut.

Selain melalui pendekatan hukum dan politik, persoalan integrasi bangsa perlu dilakukan melalui pendekatan sosial-kultural yang secara langsung menyentuh persoalan relasi sosial, yang mempertemukan berbagai kelompok etnik dan memfasilitasi terjadinya komunikasi serta kerjasama lintas etnik dan agama. Integrasi bangsa bukan sekedar persoalan perundangan, melainkan juga persoalan pengalaman praktik kehidupan sosial, dan perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan.

Dalam sistem pendidikan nasional, pengelolaan keanekaragaman ini sampai pada tingkat tertentu sebenarnya sudah terakomodasi melalui muatan lokal dalam kurikulum dan diberikannya pelajaran Pancasila sejak dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Selain itu, sistem pendidikan nasional Indonesia juga menerima paradigma bahwa pendidikan mencakup *learning to know*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Namun demikian, kompetensi yang diharapkan melalui kurikulum muatan lokal belum bisa mengakomodasi kepentingan siswa yang berlatar belakang etnik Cina; sementara itu, kompetensi *learning to live together* belum dijabarkan secara memadai dan pelajaran Pancasila lebih banyak menekankan aspek kognitif, sehingga kurang menghasilkan pengalaman nyata yang mendukung perkembangan aspek afektif kepribadian siswa dalam interaksi lintas etnik dan agama.

Salah satu bentuk pendidikan yang menyajikan pengalaman ber-kehidupan bersama dan menghargai berbagai perbedaan adalah yang selama ini disebut dengan *pendidikan multikultural*, atau *pendidikan toleransi*, atau *pendidikan perdamaian*. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang bertujuan mendidik siswa untuk menjaga kohesi sosial dan mendukung keanekaragaman budaya, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan semua kelompok masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, untuk belajar hidup dalam keselarasan kreatif

dalam masyarakat yang multikultural (Lynch, 1986: 3, 10).

Pendidikan multikultural berakar pada gerakan hak-hak asasi manusia di kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas dan kemudian didukung oleh gerakan kaum perempuan dan gerakan kelompok kulit berwarna (Gorski, 1999). Salah satu tokoh yang selama ini mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan pendidikan multikultural dan multietnik ini adalah James A. Banks (lihat Banks, J.A., 1981 dan Banks, J.A., 1989). Model pendidikan multikultural seperti ini telah dilaksanakan di beberapa negara, semacam Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika, yang memiliki keanekaragaman etnik, budaya/subkultur, dan agama. Gibson dalam “Approaches to Multicultural Education in the United States: Some Concepts and Assumptions” (*Anthropology and Education Quarterly*, vol. 7, no. 4, 1976) mengelompokkan pendekatan pendidikan multikultural di Amerika menjadi lima kategori, yaitu: (1) *education of the culturally different*, atau *benevolent multiculturalism*; (2) *education about cultural differences*, atau *cultural understanding*; (3) *education for cultural pluralism*; (4) *bicultural education*; (5) *multicultural education as the normal school experiences*.

Pendidikan multikultural di Indonesia sudah mulai diselenggarakan sejak beberapa tahun terakhir oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung proses integrasi bangsa. LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), misalnya, telah menyelenggarakan program Belajar Bersama (BB) Islam Transformatif dan Toleran, yang ditujukan pada pemuda dan mahasiswa, terutama aktivis organisasi. Program Belajar Bersama (BB) Islam Transformatif dan Toleran terdiri dari tiga tema, yaitu: (1) Islam dan Gender; (2) Islam dan Politik Kewarganegaraan; (3) Islam dan Relasi Agama. Program Belajar Bersama (BB) menggunakan empat prinsip utama, yaitu (1) belajar dari pengalaman, (2) terbuka dan jujur, (3) refleksi, (4) dialogis, dan salah satu tujuannya adalah transformasi sosial, penghormatan hak-hak asasi, dan penghargaan pada pluralisme (Salim, 2003: 220 – 223).

Sementara itu, PSKP (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan program yang disebut “Peace Camp” bagi para mahasiswa yang belajar di Yogyakarta tetapi berasal dari berbagai daerah, terutama daerah konflik semacam Ambon, Poso, Sampit, dan lain-lain, dengan latar belakang etnik, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan para mahasiswa tersebut dan untuk membekali mereka dengan berbagai keterampilan, semacam analisis dan penyelesaian masalah, agar mereka lebih menghayati hakikat perbedaan di antara mereka.

Di samping kedua lembaga tersebut, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS), Universitas Muhammadiyah Surakarta, juga telah melaksanakan program Serambi Kajian Multikultural (SKM) dan Kemah Perdamaian Multikultural (KPM). Program SKM ditujukan pada para mahasiswa Muslim aktivis dari berbagai

organisasi kemahasiswaan dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan kegiatan yang memadukan unsur permainan, diskusi, dan penelitian. Sementara itu, program KPM ditujukan pada pelajar SMA lintas etnik dan agama, dengan kegiatan permainan *outbound* dan diskusi. Program SKM PSB-PS ini mirip dengan program BB LkiS, sedangkan program KPM PSB-PS mirip dengan program Peace Camp PSKP.

Meskipun khalayak sasaran program BB LkiS dan program SKM PSB-PS (mahasiswa muslim dari berbagai latar belakang daerah asal, corak keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan) berbeda dari khalayak sasaran program Peace Camp PSKP (mahasiswa lintas etnik dan agama), program-program pendidikan multikultural tersebut sebenarnya memiliki kemiripan-kemiripan, yaitu: (1) bertujuan untuk menumbuhkan sikap yang menghormati perbedaan dan mengatasi perbedaan tanpa kekerasan; (2) khalayak sasaran terdiri dari pemuda/mahasiswa, terutama aktivis; (3) menekankan pada aspek pengalaman; (4) dilaksanakan secara ekstra kurikuler. Namun demikian, program-program tersebut juga memiliki perbedaan, terutama latar belakang khalayak sasaran. LkiS dan PSB-PS menekankan pada keanekaragaman di kalangan pemuda dan mahasiswa muslim, sedangkan PSKP menekankan pada keanekaragaman etnik dan agama.

Selain itu, meskipun program Peace Camp PSKP mirip dengan KPM PSB-PS, dalam arti sama-sama menekankan pada keanekaragaman etnik dan agama dan menggunakan pendekatan permainan *outbound*, program dari kedua lembaga tersebut memiliki khalayak sasaran yang berbeda. Program Peace Camp PSKP memilih para mahasiswa aktivis sebagai khalayak sasarannya, sedangkan program KPM PSB-PS memilih para pelajar SMA.

Program LkiS, PSKP, dan PSB-PS jelas sangat penting dalam konteks pengelolaan keanekaragaman bangsa Indonesia. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah bahwa program dari ketiga lembaga tersebut sebenarnya elitis (mahasiswa aktivis, kecuali program KPM PSB-PS), mahal (biaya ditanggung oleh penyelenggara dan tidak melibatkan partisipasi lembaga mitra), dan kurang berkelanjutan (banyak tergantung pada lembaga penyandang dana). Sementara itu, pendidikan multikultural seharusnya dapat diberikan lebih awal (remaja/pelajar sekolah menengah) dan dapat diakses oleh kelompok sasaran yang lebih luas, agar peluang keberhasilan pengelolaan keanekaragaman menjadi semakin tinggi. Berbagai rujukan dalam psikologi perkembangan, misalnya, menemukan bahwa individu usia 12 – 18 tahun (usia pelajar SMP dan SMA) sudah mulai dapat melewati tahap monokultur dan mencapai tahap antarbudaya (*intercultural*), baik dalam aspek pemahaman, kompetensi, sikap, partisipasi, bahasa maupun identitas (Heyward, 1998). Selain itu, untuk mencapai khalayak sasaran yang lebih luas, pendidikan multikultural perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak mahal, dapat mencapai khalayak yang lebih luas, dan dapat dilaksanakan oleh berbagai sekolah secara berkelanjutan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana model konseptual pembelajaran berkehidupan bersama lintas etnik dan agama yang sesuai dengan permasalahan siswa dalam interaksi sosial sehari-hari.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dalam rangka *need assessment* untuk mengetahui kondisi sekolah dan interaksi sosial siswa dalam pergaulan sehari-hari di sekolah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara dan angket.

Wawancara dilakukan kepada para informan, yang terdiri dari tujuh siswa SMA di wilayah penelitian. Informan yang diwawancarai dipilih secara purposif. Di antara pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan informan adalah bahwa informan merupakan siswa SMA yang masih aktif dan mewakili variasi ketiga etnik di wilayah penelitian (Jawa, Tionghoa, dan Arab).

Adapun angket diberikan kepada kepala sekolah dan guru BK/BP dari lima sekolah yang berbeda. Sampai pada tingkat tertentu kelima sekolah yang dipilih mewakili variasi sekolah yang ada di wilayah penelitian, yaitu sekolah negeri, sekolah swasta Islam, sekolah swasta Katholik, dan sekolah swasta Kristen. Angket untuk kepala sekolah menekankan pada hal-hal yang terkait dengan kebijakan, baik dalam kaitannya dengan penerimaan siswa, pendidikan agama, muatan kurikulum lokal, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Adapun angket untuk guru BK/BP menekankan pada hal-hal yang terkait dengan pergaulan siswa beserta permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial siswa dan cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Data yang terkumpul melalui wawancara dan angket dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya hasil analisis dijadikan bahan pertimbangan untuk mendesain model konseptual pembelajaran untuk berkehidupan bersama.

Secara rinci langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam interaksi sosial siswa sehari-hari di sekolah. Identifikasi persoalan ini didasarkan atas data yang terkumpul melalui wawancara dengan siswa dan hasil pengamatan guru BK/BP terhadap interaksi sosial siswa di sekolah, yang dituangkan secara tertulis dalam angket.
2. Mendesain model konseptual pembelajaran berkehidupan bersama yang dituangkan dalam bentuk modul pembelajaran. Modul ini mencakup materi, tujuan, strategi dan sarana/prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran berkehidupan bersama. Materi pembelajaran pembelajaran berkehidupan bersama dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi terhadap persoalan yang

muncul dalam interaksi sosial siswa. Setelah merumuskan materi dan tujuan pembelajarannya, langkah selanjutnya adalah menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran berkehidupan bersama. Kegiatan yang disusun dilengkapi dengan strategi pembelajaran, dan sarana/prasarana yang diperlukan.

3. Mengkaji ulang *draft* modul pembelajaran berkehidupan bersama dengan melibatkan pakar yang berlatar belakang bidang keahlian pendidikan multikultural, pendidikan remaja, dan psikologi komunitas
4. Merevisi *draft* modul pembelajaran berkehidupan bersama berdasarkan masukan dari para pakar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Sekolah

Kebijakan sekolah difokuskan pada kebijakan dalam penerimaan siswa baru, terutama dalam kaitannya dengan komposisi etnik dan agama calon siswa, muatan kurikulum lokal dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, bagian ini juga secara lebih khusus menyangkut kegiatan kepramukaan, yang merupakan salah satu dari kegiatan ekstra-kurikuler populer di kalangan siswa pada dasa warsa 70-an dan 80-an.

#### a. Komposisi Etnik dan Agama Siswa

Berdasarkan hasil angket kepada kepala sekolah ditemukan bahwa dalam penerimaan siswa baru, sekolah tidak memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan jumlah siswa yang diterima beserta komposisi siswa yang diterima, baik dalam kaitannya dengan komposisi etnik, agama, maupun komposisi jenis kelamin. Namun demikian, terdapat kebijakan yang terkait dengan daya tampung masing-masing sekolah dengan jumlah siswa maksimum per kelas sebanyak 40 orang.

Semua sekolah, terutama sekolah negeri, terbuka untuk calon siswa tanpa membedakan latar belakang etnik dan agama calon siswa. Heterogenitas etnik ditemukan di beberapa sekolah negeri maupun swasta. Di sekolah negeri terdapat siswa dari ketiga kelompok etnik (Jawa, Tionghoa, Arab); di sekolah swasta Katholik dan Kristen ditemukan siswa dari etnik Jawa dan Tionghoa; sedangkan di sekolah swasta Islam ditemukan siswa dari etnik Jawa dan Arab. Selain itu, di sekolah negeri juga ditemukan siswa yang berlatar belakang agama berbeda-beda (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, dan Budha); di sekolah Katholik/Kristen ditemukan siswa yang mayoritas beragama Katholik/Kristen dan sebagian kecil siswa beragama Islam, Hindu, atau Budha; sedangkan di sekolah Islam hanya ditemukan siswa beragama Islam.

Dengan demikian, terdapat kecenderungan siswa dari etnik Tionghoa untuk memilih sekolah negeri atau swasta Katholik/Kristen, sementara siswa etnik Arab cenderung memilih sekolah-sekolah negeri atau swasta Islam. Begitu pula, terdapat kecenderungan siswa dari berbagai latar belakang agama untuk memilih sekolah negeri; siswa beragama Katholik/Kristen cenderung memilih sekolah negeri atau sekolah-sekolah Katholik/Kristen; siswa beragama Islam cenderung memilih sekolah negeri atau sekolah-sekolah Islam; dan siswa beragama Hindu/Budha cenderung memilih sekolah negeri atau sekolah Katholik/Kristen.

Sekolah-sekolah negeri menyediakan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut masing-masing siswa. Siswa yang beragama Islam diberi pelajaran agama Islam oleh guru agama Islam, begitu pula siswa yang bergama Katholik, Kristen, Hindu, dan Budha diberi pelajaran agama masing-masing oleh guru agama masing-masing. Di sekolah-sekolah Katholik/Kristen, siswa beragama Islam tidak diberi pelajaran agama Islam, tetapi harus mengikuti pelajaran agama Katholik/Kristen sebagaimana siswa lain yang bergama Katholik/Kristen. Kebijakan yang sama juga terjadi pada sekolah-sekolah Islam, yang tidak menyediakan pelajaran agama dan guru agama selain Islam.

Namun demikian, tidak semua sekolah negeri menjadi pilihan siswa dari semua kelompok etnik. Hanya ada satu sekolah negeri yang memiliki siswa dari etnik Tionghoa dan Arab dengan jumlah yang cukup signifikan. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah negeri favorit di kalangan siswa di wilayah penelitian. Selain sekolah negeri ini, sekolah lain yang menjadi pilihan sebagian besar siswa etnik Tionghoa adalah sekolah swasta Katholik atau Kristen. Pola serupa juga terjadi pada siswa etnik Arab. Pilihan siswa etnik Arab selain sekolah negeri favorit ini adalah sekolah Islam.

Kecenderungan dalam pemilihan sekolah ini menyiratkan bahwa meskipun berbagai sekolah tidak memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan komposisi etnik dan agama, latar belakang keagamaan lembaga pendidikan menjadi unsur penting bagi masyarakat dalam pemilihan sekolah, sehingga siswa beragama Katholik/Kristen cenderung memilih sekolah negeri favorit atau sekolah Katholik/Kristen, dan siswa beragama Islam cenderung memilih sekolah negeri favorit atau sekolah Islam. Begitu pula, siswa etnik Tionghoa cenderung memilih sekolah negeri favorit atau sekolah Katholik/Kristen, sedangkan siswa etnik Arab cenderung memilih sekolah negeri favorit atau sekolah Islam. Dengan demikian, kecenderungan pemusatan siswa yang berlatar belakang etnik atau agama tertentu pada sekolah-sekolah tertentu sebenarnya tidak terkait dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh masing-masing sekolah, melainkan semata-mata merupakan preferensi masyarakat terhadap sekolah-sekolah tersebut.

## b. Muatan Lokal dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Semua sekolah di wilayah penelitian memberikan pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan lokal kurikulum SMA. Pemilihan Bahasa Jawa sebagai muatan lokal ini didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah/Kakanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah yang menetapkan Bahasa Jawa sebagai muatan kurikulum lokal. Selain Bahasa Jawa, sejumlah sekolah swasta juga memberikan muatan lokal lain, semacam teknologi pengolahan pangan dan tambahan pelajaran agama.

Semua sekolah di wilayah penelitian menyediakan kegiatan ekstra-kurikuler yang berupa aneka cabang olahraga, kesenian, dan kegiatan akademik. Pemilihan terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler ini didasarkan atas pilihan siswa melalui angket yang dilakukan oleh sekolah dan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ekstrakurikuler yang berupa olahraga meliputi bola basket, bulu tangkis, sepak bola, bola volley, tenis meja, bela diri, dan cinta alam (panjat tebing, *caving*, *wall-climbing*, SAR, PPPK, dan lain-lain); ekstrakurikuler yang berupa kesenian meliputi teater, pandu sorak, musik (*band*), tari (tradisional dan kontemporer), paduan suara, kelompok doa, qiro'ah, dan khitobah; sedangkan ekstrakurikuler yang berupa kegiatan akademik adalah karya ilmiah remaja, jurnalistik, dan lab bahasa Inggris. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan ekstrakurikuler lainnya, semacam pramuka, palang merah remaja, dan polisi keamanan sekolah.

Selain olahraga pertandingan (yang dipertandingkan), semacam bola basket, bulu tangkis, sepak bola, dan tenis meja, jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler lain yang banyak diminati oleh siswa adalah olahraga cinta alam. Olahraga cinta alam semacam panjat tebing (*rock-climbing*), panjat dinding (*wall-climbing*), menelusuri gua (*caving*), arung jeram, dan mendaki gunung (*hiking*) menarik minat siswa karena dianggap mengasyikkan, mengandung banyak tantangan dan petualangan, dan bergengsi.

## c. Kegiatan Kepramukaan

Kegiatan kepramukaan tidak lagi diberikan kepada siswa di semua sekolah di wilayah penelitian. Kegiatan kepramukaan diberikan hanya di sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah Islam sebagai kegiatan wajib bagi siswa kelas I (kelas X). Sebagian dari sekolah Katholik/Kristen tidak lagi menyediakan kegiatan kepramukaan. Di antara alasan yang digunakan untuk menetapkan tidak diselenggarakannya kegiatan kepramukaan di sekolah-sekolah tersebut adalah bahwa berdasarkan angket yang dilakukan oleh sekolah, kegiatan kepramukaan tidak lagi diminati oleh siswa.

Kegiatan kepramukaan dianggap membosankan oleh siswa karena program dan kegiatannya tidak pernah diperbaharui dan tidak menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek, sehingga jenis kegiatannya dari dulu hingga sekarang hanya itu-itu saja dan tidak pernah berubah. Sebagian siswa bahkan menganggap pramuka sebagai sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman.

Di satu sisi, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan berpandangan bahwa kegiatan kepramukaan bermanfaat bagi siswa, terutama untuk melatih kedisiplinan, mengembangkan solidaritas, dan memupuk rasa kesetiakawanan sosial. Namun demikian, sekolah-sekolah tersebut, di sisi lain, juga mengakui bahwa kegiatan kepramukaan selama ini monoton dan membosankan, sehingga tidak diminati oleh siswa. Oleh karena itu, di antara saran yang muncul untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah bahwa kegiatan kepramukaan perlu dikemas kembali sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan siswa.

## 2. *Permasalahan dalam Interaksi Sosial Siswa*

Dalam interaksi sosial siswa, terjadi perilaku-perilaku tertentu yang menyiratkan kekurangan kemampuan siswa dalam berkehidupan bersama, baik dalam kaitannya dengan menerima keberadaan orang lain, menyikapi perbedaan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, kesediaan bekerjasama dengan orang lain maupun menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Meskipun persoalan yang terkait dengan perbedaan agama tidak terungkap secara eksplisit, sebagaimana perbedaan etnik, potensi permasalahan tersebut sebenarnya dapat tersirat dalam berbagai persoalan yang muncul dalam interaksi sosial siswa sehari-hari.

Secara garis besar, persoalan yang muncul dalam interaksi sosial siswa tercermin dalam lima perilaku anti-sosial siswa, yaitu: ejek-ejekan, geng-gengan, menutup diri, konflik, dan pencurian. Kelima perilaku anti-sosial dalam interaksi sosial siswa ini menyiratkan adanya 10 (sepuluh) masalah yang terkait dengan berkehidupan bersama. Kesepuluh permasalahan dalam interaksi sosial siswa, yaitu: (1) kurangnya toleransi terhadap perbedaan dan kekhasan orang lain, (2) kurangnya penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain, (3) kurangnya kesediaan untuk menerima keberadaan orang lain, (4) terjadinya diskriminasi, (5) kurangnya kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain, (6) adanya prasangka dan stereotip, (7) kurangnya keterbukaan, (8) ketidakmampuan menyelesaikan persoalan secara damai, (9) kurangnya kejujuran, dan (10) kurangnya tanggung jawab, baik pribadi maupun sosial, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Menurut rumusan *LVEP* atau *Living Values: An Educational Program* (Tillman, 2004), terdapat 12 (dua belas) nilai universal yang perlu diajarkan kepada

Tabel 1. Identifikasi Masalah dalam Interaksi Sosial Siswa

PENUTURAN SISWA	PENGAMATAN GURU BK	IDENTIFIKASI MASALAH
<p>”Ejek-ejekan”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengejek dengan menyebut karakteristik fisik ”gendut” ”ceking” ”sipit”, ”keriting”.</li> <li>• Mengejek dengan menyebut nama dan profesi orangtua ”Abdullah beras”, ”Fatimah Minyak”, ”Joko Jok”, dll.</li> <li>• Mengejek dengan menyebut kelompok etnik ”Ayu Cino”, ”Abdullah Encik”, Steven Londo”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah pergaulan</li> <li>• pribadi yang belum matang</li> <li>• Masalah ketertiban</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak toleran terhadap perbedaan</li> <li>2. Tidak menghormati &amp; tidak menghargai kekhasan orang lain</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geng-gengan</li> <li>• Bergerombol</li> <li>• Membuat kelompok eksklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan</li> <li>• Eksklusivisme</li> <li>• Perilaku yang merugikan dirinya dan menyimpang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tidak menerima keberadaan yang lain</li> <li>4. Diskriminasi</li> <li>5. Tidak bersedia bekerjasama dengan orang lain</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”Cuek”</li> <li>• ”Acuh tak acuh”,</li> <li>• ”Menutup diri”,</li> <li>• ”Sombong”,</li> <li>• ”Sok”</li> <li>• ”Mentang-mentang”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasangka buruk</li> <li>• Miskomunikasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Prasangka dan stereotip</li> <li>7. Kurangnya keterbukaan sikap</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”jothakan”, ”neng-nengan”, ”dieman”</li> <li>• ”bertengkar”, ”adu mulut”, ”brantem”</li> <li>• ”berkelahi”</li> <li>• ”rebutan pacar”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertengkaran</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Ketidakmampuan menyelesaikan persoalan secara damai</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehilangan uang, handphone, dan barang-barang lain</li> <li>• Kesulitan keuangan</li> <li>• Kesulitan belajar</li> <li>• Kesulitan membagi waktu</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Ketidakjujuran</li> <li>10. Kurangnya tanggung jawab pribadi dan sosial</li> </ol>

siswa di seluruh dunia. Keduabelas nilai universal tersebut adalah kedamaian, penghargaan, cinta kasih, toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerjasama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan, dan persatuan. Berdasarkan rumusan nilai-nilai universal tersebut, permasalahan yang teridentifikasi, baik oleh siswa maupun oleh guru BK, dalam interaksi sosial siswa dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

1. Kurangnya toleransi (masalah 1, 3, 4, 6, dan 7)
2. Kurangnya penghargaan (masalah 2)
3. Kurangnya kesediaan bekerjasama (masalah 5)
4. Kurangnya keterampilan memecahkan masalah secara damai (masalah 1 dan 8)
5. Kurangnya kejujuran (masalah 9), dan
6. Kurangnya tanggungjawab (masalah 10).

### 3. *Alternatif Model Pembelajaran Berkehidupan Bersama*

Hasil analisis kebutuhan dan hasil identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan alternatif model pembelajaran untuk berkehidupan bersama, baik dalam kaitannya dengan materi, tujuan/sasaran, strategi, maupun evaluasi pembelajarannya.

#### a. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam model pembelajaran berkehidupan bersama ini merujuk pada perilaku-perilaku anti-sosial yang terjadi dalam interaksi sosial siswa, yang dalam *LVVD* kemudian dapat dimasukkan ke dalam enam nilai, yaitu: kedamaian, penghargaan, toleransi, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.

Namun demikian, materi pembelajaran (nilai) tersebut tidak harus disusun secara urut menurut rumusan *LVED* di dalam modul yang disusun. Dalam modul pembelajaran untuk berkehidupan bersama ini, materi pembelajaran (nilai) disusun berdasarkan kompleksitas kegiatan, dengan menempatkan kegiatan-kegiatan yang lebih kompleks (memerlukan lebih banyak alat bantu dan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi) ditempatkan dalam urutan lebih akhir, sedangkan kegiatan-kegiatan yang lebih sederhana ditempatkan dalam urutan lebih awal.

#### b. Tujuan Pembelajaran dan Indikator Kompetensi

Tujuan pembelajaran sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kompetensi yang diharapkan dapat diperoleh oleh siswa dalam pembelajaran berkehidupan bersama.

Tabel 2. Alternatif Materi Kegiatan Pembelajaran berkehidupan Bersama

IDENTIFIKASI MASALAH	<i>LIVING VALUES</i>	ALTERNATIF MATERI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak toleran terhadap perbedaan dan kekhasan orang lain</li> <li>2. Tidak menghormati &amp; tidak menghargai orang lain</li> <li>3. Tidak menerima keberadaan yang lain</li> <li>4. Diskriminasi</li> <li>5. Tidak bersedia bekerjasama dengan orang lain</li> <li>6. Prasangka dan stereotip</li> <li>7. Kurangnya keterbukaan sikap</li> <li>8. Ketidakmampuan menyelesaikan persoalan secara damai</li> <li>9. Ketidakjujuran</li> <li>10. Kurangnya tanggung jawab pribadi dan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedamaian</li> <li>2. Penghargaan</li> <li>3. Cinta kasih</li> <li>4. Toleransi</li> <li>5. Kejujuran</li> <li>6. Kerendahan hati</li> <li>7. Kerjasama</li> <li>8. Kebahagiaaan</li> <li>9. Tanggung jawab</li> <li>10. Kesederhanaan</li> <li>11. Kebebasan</li> <li>12. Persatuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedamaian (masalah 1 dan 8)</li> <li>2. Penghargaan (masalah 2)</li> <li>3. Toleransi (masalah 1, 3, 4, 6, dan 7)</li> <li>4. Kejujuran (masalah 9), dan</li> <li>5. Kerjasama (masalah 5)</li> <li>6. Tanggung - jawab (masalah 10)</li> </ol>

Tujuan materi (nilai) selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mendesain kegiatan yang dianggap sesuai, beserta indikator kompetensi masing-masing, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.

### c. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran dalam model pembelajaran berkehidupan bersama ini merujuk pada tiga prinsip utama, yaitu: (a) *active learning*, (b) *experiential learning*, dan (c) *outbound*.

#### 1). Active Learning

Prinsip *active learning* adalah pendekatan pembelajaran yang meyakini bahwa proses pembelajaran akan memberikan hasil optimal jika siswa berperan sebagai subjek belajar aktif. *Active learning* memberikan penekanan pada pentingnya peserta didik melakukan sebagian besar kegiatan pembelajaran (Silberman,

Tabel 3. Materi, Tujuan, Kegiatan, dan Indikator Kompetensi

Materi	Tujuan	Nama Kegiatan	Indikator Kompetensi
<b>Toleransi</b>	Mendorong siswa untuk bersedia menerima kehadiran orang lain yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Angin Bertiup</b></li> <li>• <b>Konsentrasi</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa bersedia berdiri/duduk berdampingan dengan orang lain yang berbeda</li> <li>2. Siswa bersedia memulai pembicaraan atau menanggapi pertanyaan orang lain yang berbeda</li> <li>3. Siswa bersedia berpindah posisi sebagai respon terhadap perkembangan keadaan.</li> <li>4. Siswa bersedia bertanya, menyebutkan, dan menghafal nama orang-orang lain di sekitarnya</li> </ol>
<b>Penghargaan</b>	Menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia berhak dihormati	<b>Bangunlah Jiwanya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa menghormati siswa lainnya.</li> <li>2. Siswa rela memberikan penghormatan kepada anggota yang dianggap paling lemah untuk menjadi pemimpin kelompok</li> </ol>
<b>Kerjasama</b>	Mendorong siswa berbagi peran dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama	<b>Selamatkan Jiwanya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dapat merumuskan bersama cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencapai bersama</li> <li>2. Siswa dapat berbagi peran dengan orang lain lain dalam mencapai tujuan bersama</li> </ol>
<b>Kedamaian</b>	Menumbuhkan kesadaran siswa bahwa kedamaian harus diupayakan bersama tanpa kekerasan	<b>Semua Dapat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dapat merumuskan cara-cara mengatasi persoalan atau konflik tanpa menggunakan kekerasan</li> <li>2. Siswa dapat berbagi peran dalam mengatasi persoalan</li> <li>3. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan secara damai</li> </ol>
<b>Kejujuran</b>	Menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa berpikiran, berkata, dan bertindak jujur menghasilkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain	<b>Tengoklah Jendelaku</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dapat menyebutkan kekurangan diri sendiri</li> <li>2. Siswa dapat menyebutkan kelebihan orang lain</li> <li>3. Siswa dapat menerima persepsi orang lain tentang dirinya</li> </ol>
<b>Tanggung jawab</b>	Mendorong siswa untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya	<b>Satu untuk Semua, Semua untuk Satu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur</li> <li>2. Siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan</li> </ol>

2001: 2). Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam model pembelajaran berkehidupan bersama ini memberikan penekanan pada peran aktif siswa, baik menulis, berbicara, berdiskusi maupun menyanyi dan menari.

## 2). Experiential Learning

Prinsip *experiential learning* adalah strategi pembelajaran yang meyakini bahwa proses pembelajaran akan memberikan hasil optimal jika siswa (subjek belajar) mengalami secara langsung kehidupan (bersama lintas etnik dan agama) yang disimulasikan melalui bentuk-bentuk permainan (Ancok, 2002: 5). Oleh karena itu, strategi pembelajaran dalam model pembelajaran berkehidupan bersama ini memberikan penekanan pada aspek pengalaman (eksperiensial) dengan melibatkan siswa dalam pengalaman konkret interaksi sosial antarkelompok yang berbeda (lintas etnik dan agama).

## 3). Outbound

Prinsip *outbound* adalah pendekatan pembelajaran yang meyakini bahwa proses pembelajaran akan memberikan hasil yang optimal jika kegiatan pembelajaran dilakukan di alam terbuka (Ancok, 2002: 5). Selain itu, prinsip *outbound* juga mengacu pada jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati oleh siswa, yaitu jenis-jenis olahraga cinta alam yang mengandung tantangan dan petualangan. Oleh karena itu, setting pembelajaran dalam model pembelajaran berkehidupan bersama ini adalah alam terbuka dan berbasis pada perkemahan (*camping*).

## c. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran berkehidupan bersama ini terdiri dari tiga, yaitu pre-test, evaluasi kegiatan, dan post-test.

- 1). Pretest dilakukan pada saat siswa melakukan registrasi di lokasi sebelum pembelajaran dimulai (dibuka). Pretest terdiri dari butir-butir pertanyaan dan sosiogram.
- 2). Evaluasi kegiatan adalah evaluasi yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh ko-fasilitator yang bertanggung jawab terhadap setiap anggota kelompok masing-masing. Evaluasi kegiatan mengacu pada rumusan indikator kompetensi dan dilakukan dengan metode observasi sistematis dan *checklist* yang dikembangkan berdasarkan indikator kompetensi.
- 3). Post-test dilakukan pada saat seluruh kegiatan dilaksanakan sebelum pembelajaran diakhiri (ditutup). Post-test terdiri dari butir-butir pertanyaan dan sosiogram yang sama dengan pre-test. Asumsinya adalah bahwa hasil post-

test berbeda dari pretest dan perbedaan tersebut merupakan kontribusi dari pemberian pengalaman pembelajaran berkehidupan bersama ini.

Ketiga macam evaluasi tersebut diharapkan dapat secara relatif menggambarkan proses pembelajaran dan mengukur keberhasilan pembelajaran untuk berkehidupan bersama.

#### 4. Hasil Review Modul Pembelajaran Berkehidupan Bersama

Modul Pembelajaran Berkehidupan Bersama ini telah direview oleh tiga orang *reviewer*, di samping empat tim peneliti. Ketiga *reviewer* memiliki bidang keahlian berbeda. *Reviewer* pertama memiliki bidang keahlian pendidikan multikultural, *reviewer* kedua memiliki bidang keahlian pendidikan orang dewasa muda (*young adults*), dan *reviewer* ketiga memiliki bidang keahlian psikologi komunitas. Berdasarkan latar belakang bidang keahlian masing-masing, ketiga *reviewer* mengkaji modul pembelajaran berkehidupan bersama, baik materi, tujuan, strategi, maupun evaluasi pembelajarannya.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam modul pembelajaran berkehidupan bersama ini dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Kegiatan yang memperoleh penilaian tertinggi adalah “Tengoklah Jendelaku”, dengan rerata sebesar 83.34; sedangkan kegiatan yang memperoleh nilai terendah adalah “Semua Dapat”, dengan rerata sebesar 68.34. Hasil penilaian *reviewer* ini menunjukkan bahwa secara konseptual modul pembelajaran berkehidupan bersama ini dianggap mampu mencapai tujuan

Tabel 4. Hasil Review Modul Pembelajaran Berkehidupan Bersama

No.	Nama Kegiatan	Skor Reviewer			
		I	II	III	Rerata
1	Angin Bertiup	85	85	75	81.67
2	Konsentrasi	85	85	75	81.67
3	Tengoklah Jendelaku	80	85	85	83.34
4	Bangunlah Jiwanya	85	85	75	81.67
5	Satu untuk Semua, Semua untuk Satu	85	85	75	81.67
6	Semua Dapat	75	70	60	68.34
7	Selamatkan Jiwanya	85	75	75	78.34
Nilai Rerata		82.86	81.43	74.30	79.53

pembelajaran secara tepat dan dapat diterapkan untuk siswa sekolah menengah (SMA/SMP).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, simpulan-simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Keanekaragaman latar belakang etnik dan agama siswa belum mendapatkan perhatian oleh berbagai sekolah, sehingga sekolah-sekolah di wilayah penelitian belum memiliki kebijakan tertentu dan menyiapkan pengalaman pembelajaran tertentu untuk mengelola keanekaragaman etnik dan agama siswa. Sementara itu, dalam interaksi sosial siswa sehari-hari dijumpai masalah-masalah yang mengindikasikan kurangnya keterampilan sosial siswa dalam berkehidupan bersama.
2. Modul pembelajaran berkehidupan bersama lintas etnik dan agama yang disusun berdasarkan hasil *need assessment* di sekolah menengah di wilayah penelitian dinilai menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan tujuan dan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga secara konseptual diperkirakan dapat menjadi alternatif model pembelajaran berkehidupan bersama siswa.
3. Berdasarkan bentuk kegiatan, strategi pembelajaran, dan sarana/prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaannya, modul ini tepat untuk diberikan kepada siswa sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, terkait dengan menurunnya minat siswa pada kegiatan kepramukaan, modul ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk *revitalisasi* dan *repackaging* kegiatan kepramukaan.

Secara konseptual, modul yang dihasilkan oleh penelitian ini dinilai mampu mengungkap tujuan pembelajaran berkehidupan bersama lintas etnik dan agama, tetapi secara empiris modul belum teruji efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi sosial siswa. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut yang menguji efektivitas modul ini sebelum modul ini dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Selain itu, modul ini dirancang berdasarkan konteks Surakarta yang memiliki faktor-faktor khusus, semacam lingkungan budaya Jawa dan sejarah kerusuhan yang berulang. Oleh karena itu, modul ini perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah modul ini juga mungkin dapat diadopsi di tempat lain, dengan konteks yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Jamaluddin. 2002. *Outbound Management Training*. Yogyakarta: Tim UII Press.
- Banks, J. A. 1981. *Multiethnic Education: Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon.
- Banks, J. A. & Cherry A. McGee Banks (Eds.). 1989. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston: Allyn and Bacon.
- Clubb, O. Edmund. 1964. *Twentieth-Century China*. New York: Columbia University Press.
- Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Creel, H. G. 1990. *Alam Pikiran Cina sejak Confucius sampai Mao Zedong*. Edisi Terjemahan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Feith, Herbert and Lance Castles. 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hariyono, P. 1994. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Heyward, M. 1998. "The Development of Global Perspectives in Young Children". *Makalah laporan hasil penelitian*. Dalam Seminar Sehari "Early Childhood" Yogyakarta: IKP Yogyakarta.
- Jahja, H. Junus (ed.). 1991. *Nonpri di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Lynch, James. 1986. *Multicultural Education: Principles and Practice*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mulyadi, M. Hari, Sudarmono, Abraham Setiyadi, Hari D. Utomo, Rohadi, Didiek Wahyudiono, Tatang Badru Tamam, M. Amin, 1999. *Runtuhnya Kekuasaan "Kraton Alit": Studi Radikalisasi Sosial Wong Sala dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*. Surakarta: LPTP.
- Sa'dun, Moch. M. (ed.), 1999. *Pri dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Salim, Hairus. 2003. "Belajar Bersama Pluralisme: Sekelumit Pengalaman". *Wacana*, XV, 2003: 223)

- Silberman, Mel. 2001. *Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Yayasan YAPPENDIS.
- Skinner, G. Wiliam. 1957. *Chinese Society in Thailand: An Analytical History*. Ithaca. New York: Cornel University Press.
- Soekiman, Djoko. 2000. *Kebudayaan Indies dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII - Medio Abad XX)*. Yogyakarta: Bentang.
- Taher, Tarmizi. 1997a. *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional, dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Jakarta: PPIM.
- Taher, Tarmizi. 1997b. *Aspiring for Middle Path: Religious Harmony in Indonesia*. Jakarta: CENSIS.
- Tillman, Diane. 2004. *Living Values Activities for Young Adults/Pendidikan Nilai untuk Kaum Dewasa-Muda*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wibowo, I. (ed.). 1999. *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.